

ABSTRAK

Dominasi wilayah perairan dibandingkan daratan hingga mendapat sebutan sebagai negara maritim tidak membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi besar dalam menghasilkan bahan baku pembuatan garam. Sekiranya hanya 10% dari total kekayaan laut berhasil dikembangkan. Ketidakseimbangan antara kemampuan kapasitas dan teknologi produksi garam, serta adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam dalam skala nasional menjadi alasan utama mengapa para pemangku kebijakan memutuskan untuk membuka keran impor garam. Penelitian hukum ini menunjukkan bahwa problematika atas kenaikan impor garam tidak luput dari peranan pemerintah yang dipandang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, salah satunya ialah pelayanan pada sektor/bidang publik. Maka dari itu penelitian hukum ini memiliki rumusan masalah, di antaranya bagaimana standar pelayanan publik terhadap prosedur izin impor garam serta bagaimana model standar pelayanan publik yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan terhadap prosedur izin impor garam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus yang mengatur terkait standar pelayanan terhadap prosedur izin impor garam. Hal tersebut tidak sejalan dengan pedoman layanan informasi yang diberlakukan di lingkup kementerian perdagangan, yaitu tidak adanya standar pelayanan publik yang disusun dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, model standar pelayanan publik didesain dan disusun guna memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat memudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik, Impor Garam.

ABSTRACT

The dominance of water areas compared to land to be called a maritime country does not make Indonesia a country with great potential in producing raw materials for salt making. Only 10% of the total marine wealth is successfully developed. The imbalance between the ability of salt production capacity and technology, as well as the imbalance between salt production and consumption on a national scale are the main reasons why policy makers decide to open the salt import tap. This legal research shows that the problem of the increase in salt imports cannot escape the role of the government which is seen as having the authority to organize government activities, one of which is services in the public sector / field. Therefore, this legal research has a formulation of problems, including how public service standards for salt import permit procedures and how the right public service standards model in order to improve service quality for salt import permit procedures.

The research method used is normative juridical research method. The approach taken is a statutory approach combined with a qualitative descriptive analysis method.

The results show that there is no specific regulation governing service standards for salt import permit procedures. This is not in line with the information service guidelines applied within the Ministry of Trade, namely the absence of public service standards prepared and determined based on the provisions of applicable laws and regulations. In order to improve the quality of public services, the public service standards model is designed and compiled to provide the widest possible access to information to the public so that the community is facilitated to reach basic services that lead to public welfare.

Keywords: Public Service, Public Service Standards, Salt Import.